

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Dalam sistem politik negara Indonesia, Pemilihan Umum yang selanjutnya akan disebut pemilu merupakan salah satu proses politik yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali dalam pemilihan anggota legislatif yang terdiri dari DPR-RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan anggota eksekutif yaitu Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota. Pemilu menjadi tonggak penting yang mempresentasikan kedaulatan rakyat, sehingga memberikan peluang dalam pemilu yang dilakukan secara sistematis dan juga secara berkala. Oleh karena itu, pemilu dapat digolongkan sebagai elemen terpenting dalam sistem demokrasi. Suatu negara dapat dikatakan sebagai negara yang tingkat kedemokratisannya baik apabila dalam proses pemilu dilakukan secara baik, adil, transparan, teratur dan juga berkesinambungan (Hendrik, 2010). Namun apabila suatu negara tidak dapat melakukan proses pemilu dengan baik, seperti adanya kecurangan dan deskriminasi maka negara tersebut dinilai sebagai negara yang anti demokrasi (Hendrik, 2010). Pemilu menjadi salah satu tempat penyaluran aspirasi bagi masyarakat terhadap pemerintah. Dalam pemilu, masyarakat diberikan kesempatan untuk dapat menentukan pemimpin dalam masa jabatan lima tahun. Perubahan-perubahan situasi politik sebagai konsekuensi dari tuntutan demokratisasi yang akan berpengaruh pada pemerintahan di tingkat lokal. Berbagai proses demokrasi mulai tampak dalam kehidupan politik sebagai perubahan dalam sistem pemilu dan adanya prinsip otonomi daerah yang akan memberikan warna baru dalam pola rekrutmen Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (Jimung, 2005).

Partisipasi Politik merupakan wujud kedaulatan rakyat yang sangat fundamental dalam proses demokrasi dan menjadi sangat penting dalam sistem demokrasi. Partisipasi politik

menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupan suatu negara. Partisipasi politik juga menjadi cerminan dari sikap politik warga negara dalam wujud perilaku, baik itu secara psikis maupun secara fisik. Perilaku politik yang berwujud partisipasi politik dilakukan secara konvensional yang menjadi keharusan dalam setiap sistem. Partisipasi tersebut dapat dikatakan bersifat legal dan juga normatif. Partisipasi politik yang diharapkan adalah partisipasi yang mana tumbuh dengan sendirinya, atas kesadaran partisipasi murni tanpa adanya paksaan dari siapapun. Apabila masyarakat tidak turut adil atau berpartisipasi dalam aktivitas negara dapat mempengaruhi kebijakan publik karena partisipasi politik merupakan bagian dari sistem politik. Jadi, jika partisipasi politik dari masyarakat rendah dapat mempengaruhi sistem tersebut.

Kepulauan Riau adalah Provinsi yang ada di Indonesia dengan 96% merupakan daerah perairan. Provinsi Kepulauan Riau di sebelah utara berbatasan dengan Vietnam dan Kamboja, di sebelah timur berbatasan dengan Malaysia dan Provinsi Kalimantan Barat, di sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan di sebelah barat berbatasan dengan Negara Singapura, Malaysia dan Provinsi Riau. Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari 5 Kabupaten dan 2 Kota yaitu Kabupaten Bintan, Kabupaten Natuna, Kabupaten Karimun, Kabupaten Lingga, Kabupaten Anambas, Kota Batam dan Kota Tanjungpinang.

Kota Tanjungpinang merupakan Ibukota Provinsi Kepulauan Riau. Kota ini memiliki kawasan yang strategis dan juga terletak di segitiga SIJORI (Singapura, Johor, Riau). Wilayah kota Tanjungpinang terdiri dari 4 Kecamatan yaitu Kecamatan Bukit Bestari, Kecamatan Tanjung Pinang Kota, Kecamatan Tanjung Pinang Timur dan Kecamatan Tanjung Pinang Barat. Kota Tanjungpinang memiliki luas wilayah 239,5 km² dan juga memiliki jumlah penduduk sebanyak 260.519 jiwa. Kota Tanjungpinang sangat dekat dengan beberapa negara tetangga yaitu Singapura dan Malaysia. Oleh karena itu, hubungan dari ketiga negara ini yaitu Indonesia (dalam hal ini Tanjungpinang), kerajaan Malaysia dan Republik Singapura sangat

tinggi intensitasnya untuk ketiga negara ini saling mengunjungi. Dengan begitu, mulai dari perdagangan sampai dengan pariwisata menjadi ulasan yang menarik. Untuk itu masyarakat diperlukan memberikan input dibidang Politik, Pemerintahan dan Administrasi sebagai bagian dari partisipasi politik.

Beberapa bulan yang lalu tepatnya pada tanggal 27 Juni 2018, Kota Tanjungpinang telah melaksanakan pilkada yang ditujukan untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang periode 2018-2023. Pada pilkada tersebut, ada 2 paslon yang mencalonkan diri sebagai Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yaitu Paslon No 1 Syahrul-Rahma diusung dari Partai Gerindra dan Golkar dan Paslon No 2 Lis-Maya diusung dari Partai PDIP dan Golkar. Diketahui dari data KPU, bahwa Paslon No 1 memperoleh suara sebanyak 42.559 suara atau 51,45 persen sedangkan Paslon No 2 memperoleh suara sebanyak 40.160 suara atau 48,55 persen. Hal ini dapat dilihat dari tabel 1.1 Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel 1.1

Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara	%
1	Syahrul-Rahma	42.559	51,45%
2	Lis-Maya	40.160	48,55%

Sumber: KPU Kota Tanjungpinang

Di Kota Tanjungpinang daftar pemilih sebanyak 144.938, pengguna hak pilih sebanyak 85.167 dan yang tidak menggunakan hak suara sebanyak 59.771. Dalam rekapitulasi Kecamatan, di Kecamatan Tanjungpinang Bukit Bestari daftar pemilih sebanyak 38.505, pengguna hak pilih sebanyak 22.610 dan suara tidak sah sebanyak. Kecamatan Tanjung Pinang Barat daftar pemilih sebanyak 35.049, pengguna hak pilih sebanyak 20.333 dan suara tidak sah sebanyak

670. Kecamatan Tanjung Pinang Kota daftar pemilih 15.401, pengguna hak pilih sebanyak 8.977 dan suara tidak sah sebanyak 223. Pada kecamatan Tanjung Pinang Timur daftar pemilih sebanyak 55.983, pengguna hak pilih sebanyak 33.247 dan suara tidak sah sebanyak 893. Dilihat dari tingkat partisipasi pemilu Kota Tanjungpinang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungpinang menyatakan bahwa partisipasi pemilih tidak mencapai target, hanya 59 persen sedangkan target yang telah ditetapkan yaitu 77 persen. Hal ini dapat dilihat dari tabel 1.2 Rekapitulasi Pilkada Walikota Tanjungpinang 2018 sebagai berikut:

Tabel 1.2
Rekapitulasi Pilkada Walikota Tanjungpinang 2018

Uraian	Rincian				Jumlah Akhir
	Bukit Bestari	Tanjung Pinang Barat	Tanjung Pinang Kota	Tanjung Pinang Timur	
Jumlah Pemilih	38.505	35.049	15.401	55.983	144.938
Jumlah Seluruh Suara Sah	21.948	19.663	8.754	32.354	82.719
Jumlah Suara Tidak Sah	662	670	223	893	2.448
Jumlah Seluruh Suara Sah dan Suara Tidak Sah	22.610	20.333	8.977	33.247	85.167
Persentase Partisipasi Masyarakat					58,76%

Sumber: KPU Kota Tanjungpinang

Dari data diatas, dapat dilihat bahwa tingkat partisipasi politik masyarakat pada pemilu di Kota Tanjungpinang tahun 2018 masih rendah sehingga tidak mencapai target yang diharapkan. Dengan demikian, penulis mengambil judul skripsi “**Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang 2018**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Tanjungpinang 2018?
2. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Tanjungpinang 2018?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Tanjungpinang 2018
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Tanjungpinang 2018

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, diharapkan dapat memberikan informasi yang bersifat ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan judul penulis.
2. Secara praktis, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi keberhasilan melalui proses pembangunan politik yang demokrasi melalui pelaksanaan Pemilu di Kota Tanjungpinang dalam kaitannya dengan partisipasi politik masyarakat.
3. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi semua orang yang ingin mengembangkan judul yang diangkat oleh penulis.

E. Literature Review

Sebelumnya banyak penelitian yang dilakukan mengenai Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota. Sehingga untuk mengetahui tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Umum ini, dilakukan studi pustaka sebagai penerapan metode penelitian. Diantaranya mengidentifikasi metode yang pernah dilakukan dan meneruskan penelitian sebelumnya.

No	Judul	Penulis	Tahun	Isi
1	Partisipasi Politik Masyarakat Kota Pekanbaru Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2013	Gamelly Octavia.s	2015	Tingkat partisipasi masyarakat kota Pekanbaru tergolong rendah. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat antara lain yaitu: Kampanye, Nilai Budaya masyarakat, popularitas calon, media massa sebagai penunjang pengenalan masyarakat terhadap calon dan peranan KPU kota Pekanbaru. Tingkat kepuasan masyarakat yang tergolong tinggi pada proses pelaksanaan dan rendah pada saat pengumuman hasil akhir pengumuman pemenang.
2	Partisipasi Politik Masyarakat Kepulauan Riau Pada Pemilihan Kepala Daerah Gubernur Periode 2015-202	Beintan Boeskh Cakra May Hendra Putra	2016	Rendahnya partisipasi pemilih ini disebabkan oleh faktor kurangnya rangsangan politik, faktor karakteristik sosial, faktor minimnya calon, faktor keadaan politik, faktor kepedulian lingkungan politik dan faktor calon-calon yang akan dipilih.
3	Analisis Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat di Tinjau	Hardiman Wirahmat	2016	Partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Walikota

	Dari Status Sosial Ekonomi (Studi Kelurahan tamangappa Kota Makassar)			Makassar di Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala Kota Makassar cenderung sangat rendah. Status sosial ekonomi masyarakat kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala Kota Makassar dominan berada pada kategori dibawah rata-rata
4	Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Umum (Studi Turn of Voter dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013)	Tia Subekti	2014	Pertama, upaya meningkatkan partisipasi politik. Partisipasi politik merupakan bagian paling penting dalam sebuah Pemilukada. Kedua, partisipasi politik masyarakat dalam Pemilukada Kabupaten Magetan Tahun 2013 telah terjadi peningkatan yang mampu mencapai angka 72%.
5	Pemilu dan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif Dan Pemilihan Presiden Dan Calon Wakil Presiden di Kabupaten Minahasa Tahun 2014)	Daud M. Liando	2016	Tingkat partisipasi politik masyarakat sangat dinamis, namun menjadi persoalan adalah terkait motivasi. Sebagian besar masyarakat mengakui bahwa ia memilih didorong oleh faktor transaksi dan unsur kedekatan secara emosional. Visi dan misi calon bukan merupakan ukuran dalam memilih.
6	Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum	Primandha Sukma Nur Wardhani	2018	Bentuk partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilu yaitu pemberian suara, kampanye dan berbicara masalah politik. Faktor-faktor pendukung partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilu yaitu

				penerimaan perangsang politik, karakteristik sosial seseorang, sistem politik dan sistem partai tempat orang itu hidup dan perbedaan regional.
7	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilihan Umum Legislatif 2009 di Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi	Andriyus, S.Sos., M.Si	2013	Di Kecamatan Singingi Hilir ada dua faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat pada pemilihan umum legislatif tahun 2009 yaitu faktor internal dan faktor eksternal, kedua faktor tersebut sangat berpengaruh terhadap partisipasi politik masyarakat pada pemilihan legislatif tahun 2009 yang lalu, tetapi faktor internal yang lebih dominan yaitu kesadaran politik masyarakat, sedangkan faktor eksternal sangat berpengaruh terhadap partisipasi politik masyarakat dalam perilaku kandidat.
8	Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Periode Tahun 2013-2018 di Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda	Rio Sholihin, Nur Fitriyah, Sutadji M.	2014	Partisipasi masyarakat untuk terlibat menjadi anggota partai politik hanya sebesar 31,8%, partisipasi masyarakat dalam kegiatan kampanye hanya sebesar 34,1% dan partisipasi pengguna hak pilih hanya sebesar 52,27%.
9	Pengaruh Kesadaran Politik Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Bupati	Ayuni Nur Fatwa	2016	Kolerasi antara Pengaruh kesadaran Politik terhadap Partisipasi Politik sebesar 0,236 dan hasil tes menunjukkan signifikan.

	Tahun 2013 Di Desa Sesulu Kabupaten Penajam Paser Utara			Besarnya pengaruh variabel kesadaran politik terhadap partisipasi politik sebesar 13,1%.
10	Variabel-Variabel yang Mempengaruhi Rendahnya Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2008	Doni Hendrik	2010	Rendahnya sosialisasi politik merupakan variabel yang kuantitas pelaksanaannya terkecil dilakukan oleh KPUD Kota Padang. Dengan demikian, maka variabel sosialisasi politik yang rendah merupakan variabel yang menyebabkan rendahnya partisipasi politik masyarakat dalam pilkada Kota Padang tahun 2008.

Dari sepuluh Literature Review yang ada, banyak penelitian mengenai Partisipasi Politik Masyarakat, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Masyarakat dan Variabel-Variabel yang Mempengaruhi Rendahnya Partisipasi. Penelitian sebelumnya sudah ada mengenai Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota, tetapi belum ada penelitian mengenai Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Kota Tanjungpinang tahun 2018.

F. Kerangka Teori

1. Tinjauan tentang Partisipasi Politik

a. Definisi Partisipasi Politik

Partisipasi berasal dari kata bahasa Inggris yaitu *participation* yang artinya suatu keikutsertaan atau ambil bagian dalam kegiatan suatu organisasi. Menurut Adi(2007), Partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah maupun potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif yang menjadi solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah dan

keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Sedangkan politik merupakan usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga sehingga dapat membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang harmonis.

Secara umum, Partisipasi Politik merupakan suatu kegiatan seseorang maupun sekelompok orang untuk ikut serta dalam kehidupan politik dengan memilih pemimpin negara yang dimana secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah. Kegiatan tersebut seperti memberikan atau menggunakan hak suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota partai atau menjadi salah satu gerakan sosial dengan *direct action* dan lain sebagainya.

Konsep partisipasi politik di negara-negara demokrasi beranggapan bahwa kedulatan berada di tangan rakyat dengan melalui kegiatan bersama untuk menentukan masa depan masyarakat dan menentukan orang-orang yang akan menjadi pemimpin. Masyarakat dapat berpartisipasi dengan memberikan suara atau kegiatan lain, melalui kegiatan bersama kepentingan masyarakat dapat tersalurkan atau setidaknya diperhatikan dan sedikit banyaknya partisipasi masyarakat dapat memengaruhi tindakan orang-orang yang berwenang untuk membuat suatu keputusan yang mengikat.

Partisipasi politik sangat berkaitan dengan kesadaran politik, karena jika mereka sadar diperintah maka orang itu akan meminta untuk diberikan hak suara pada saat penyelenggaraan pemerintah. Hal itu sendiri dapat dimulai dari orang-orang yang berpendidikan, yang kehidupannya lebih bagus dan juga terkemuka. Di beberapa negara demokrasi menganggap banyaknya partisipasi masyarakat itu jauh lebih baik, karena tingkat partisipasi tinggi menunjukkan bahwa masyarakat dapat ikut maupun memahami masalah tentang politik sehingga ada keinginan untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Tetapi, jika tingkat

partisipasi itu rendah dianggap sebagai tanda yang kurang baik, karena ada banyak masyarakat yang tidak memberikan perhatian dengan masalah kenegaraan.

Di samping banyaknya masyarakat yang ikut berpartisipasi, ada beberapa dari mereka dalam kegiatan politik tidak sama sekali ikut melibatkan diri. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai apatis. Masyarakat yang tidak ikut pemilihan karena sikap acuh tak acuh atau pun kurang memahami tentang masalah politik. Namun, ada sebagian masyarakat tidak begitu yakin akan berhasil usaha untuk memengaruhi kebijakan pemerintah dan ada juga masyarakat yang secara sengaja untuk tidak ikut memilih karena sedang berada dilingkungan yang dimana ketidaksertaan merupakan hal yang sudah biasa. Kemungkinan juga masyarakat tidak memilih karena menganggap keadaan tidak terlalu buruk dan siapa pun yang nantinya terpilih tidak akan mengubah situasi, sehingga masyarakat tidak merasa perlu memanfaatkan hak pilihnya.

Menurut Conyers(1991), pentingnya partisipasi adalah sebagai berikut:

- 1) Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan juga sikap masyarakat setempat yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal
- 2) Masyarakat akan lebih mempercayai proyek maupun program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaanya, karena mereka akan mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut
- 3) Menjadi suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri.

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik

Ada beberapa faktor yang menyebabkan orang mau atau tidak mau ikut berpartisipasi dalam politik (Hendrik, 2010), yaitu sebagai berikut:

1) Status sosial dan ekonomi

Status sosial merupakan posisi seseorang yang dilihat dari keturunan, pendidikan, dan pekerjaan. Sedangkan status ekonomi berdasarkan kepemilikan kekayaan. Tingginya status sosial tidak hanya memiliki pengetahuan politik, tetapi juga memiliki minat dan juga perhatian pada politik.

2) Situasi

Situasi politik juga dapat disebabkan oleh keadaan seperti cuaca, keluarga, kehadiran orang lain dan keadaan ruang.

3) Afiliasi politik orang tua

Mendorong tumbuhnya kesadaran maupun kedewasaan politik masyarakat untuk dapat menggunakan hak politiknya secara bebas dan bertanggungjawab dalam melakukan setiap aktifitas politik.

4) Pengalaman berorganisasi

Organisasi merupakan suatu sistem yang mengatur kehidupan masyarakat ataupun suatu perilaku yang terpola dengan memberikan jabatan pada orang-orang tertentu untuk menjalankan fungsi tertentu demi pencapaian tujuan bersama (Simangunsong, 2004).

5) Kesadaran politik

Kesadaran hak dan kewajiban sebagai warga negara yang menyangkut tentang pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan politik dan menyangkut minat maupun perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat.

6) Kepercayaan terhadap pemerintah

Kepercayaan terhadap pemerintah merupakan penilaian seseorang terhadap pemerintah apakah dapat dipercaya dan dapat dipengaruhi atau tidak, baik itu dalam pembuatan kebijakan-kebijakan atau pelaksanaan pemerintahan.

2. Tinjauan tentang Partai Politik

a. Definisi Partai Politik

Partai politik merupakan organisasi penggolongan masyarakat berdasarkan kesamaan kehendak untuk memperjuangkan cita-cita politik sesuai dengan aliran kemasyarakatan dalam rangka penyempurnaan tata hidup dalam masyarakat. Menurut Budiardjo(2008), partai politik yaitu kelompok yang terorganisasi dimana beberapa anggotanya memiliki orientasi nilai-nilai dan cita-cita yang sama dengan tujuan mendapatkan kekuasaan dan merebut kedudukan (biasanya), dengan cara konstitusional untuk melaksanakan berbagai kebijakan mereka.

Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 pasal 1, partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Fungsi-Fungsi Partai Politik

Menurut Budiardjo(2008), partai politik memiliki empat fungsi yaitu sebagai berikut:

1) Komunikasi Politik

Partai politik bertugas menyalurkan beragam aspirasi masyarakat dan menekan kesimpngsiuran pendapat di masyarakat. Keberadaan partai politik menjadi wadah penggabungan aspirasi anggota masyarakat yang senada agar dapat di rumuskan secara lebih terstruktur atau teratur.

2) Sosialisasi Politik

Untuk memperoleh dukungan dari masyarakat, partai politik harus berusaha menunjukkan diri sebagai pejuang kepentingan umum. Sosialisasi politik menjadi wujud nyata yang berbentuk ceramah penerangan, kursus kader, seminar, dll.

3) Rekrutmen Politik

Fungsi dari partai politik adalah mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk aktif berpolitik sebagai anggota partai politik tersebut agar dapat memperluas partisipasi politik. Selain itu, rekrutmen politik diarahkan untuk generasi muda potensial sehingga dapat mempersiapkan kepemimpinan di dalam struktur partai politik.

4) Mengelola Konflik

Partai Politik bertugas untuk mengelola konflik yang muncul di kalangan masyarakat sebagai akibat adanya dinamika demokrasi yang memunculkan persaingan dan perbedaan pendapat.

3. Tinjauan Masyarakat

Masyarakat dalam bahasa Inggris *society* yang berasal dari bahasa Latin *socius* yang berarti teman. Secara implisit, kata *society* mengartikan bahwa setiap anggotanya mempunyai perhatian maupun kepentingan yang sama untuk mencapai tujuan bersama. Kata masyarakat dari bahasa Arab *syaraka* yang berarti ikut serta dan berpartisipasi. Dalam definisi lain, masyarakat merupakan keseluruhan antara hubungan-hubungan antarmanusia. Menurut Robert M. Mclver (dalam Miriam, 2008), masyarakat adalah suatu sistem hubungan-hubungan yang ditata (*Society means a system of ordered relation*).

Masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang hidup bersama-sama dalam suatu wilayah tertentu dan saling berhubungan satu sama lainnya. Masyarakat hidup di wilayah geografis yang memiliki kebudayaan maupun lembaga yang sama dan dapat berinteraksi satu sama lainnya dikarenakan faktor agama, faktor budaya maupun faktor etnis. Setiap manusia

memiliki kebutuhan fisik dan juga kebutuhan mental yang dapat menghidupinya sendiri dengan bekerja sama untuk mencapai beberapa nilai. Untuk dapat memenuhi kebutuhan maupun keperluan dan kepentingannya, mereka harus berinteraksi satu sama lain dengan berkelompok dan asosiasi. Dalam hidup berkelompok maupun dengan manusia lain, pada dasarnya manusia harus memiliki beberapa nilai. Menurut Harold Laswell (dalam Miriam, 2008) ada delapan nilai yang diinginkan setiap manusia, yaitu:

- a) Kekuasaan
- b) Kekayaan
- c) Penghormatan
- d) Kesehatan
- e) Kejujuran
- f) Keterampilan
- g) Pendidikan/Penerangan
- h) Kasih sayang

Adapun Unsur-unsur masyarakat menurut Soekanto (2009), yaitu sebagai berikut:

- a) Manusia yang hidup bersama
- b) Bercampur dalam waktu yang cukup lama
- c) Mereka sadar bahwa mereka merupakan satu sama lain
- d) Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu sistem hidup bersama

G. Definisi Konseptual

Berdasarkan judul yang penulis sampaikan pada latar belakang masalah di atas yaitu Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang 2018, maka definisi konsep dalam penelitian ini adalah:

a. Partisipasi Politik

Keterlibatan warga dalam segala tahapan dan peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan.

b. Partai Politik

Media bagi setiap warga negara untuk dapat ikut serta dan berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara.

c. Masyarakat

Sekumpulan manusia yang hidup bersama-sama dalam suatu wilayah, saling berhubungan satu sama lain dan saling berinteraksi dalam suatu hubungan sosial.

H. Definisi Operasional

a. Partisipasi Politik

Keikutsertaan warga negara dalam kehidupan politik dengan memilih pemimpin yang dapat mempengaruhi hidup warga negara dan jalannya kebijaksanaan umum. Untuk dapat menjelaskan partisipasi politik, Partisipasi dapat terwujud dalam berbagai bentuk.

Bentuk Partisipasi politik dalam Pemilu meliputi sebagai berikut:

1. Melaksanakan dan mengikuti Sosialisasi Pemilihan Umum
2. Partisipasi pemilih memberikan suara pada saat Pemilihan Umum
3. Peliputan segala kegiatan yang menyangkut proses penyelenggaraan Pemilihan Umum yang dilakukan oleh para wartawan dan aparat media lainnya disampaikan melalui pemberitaan atau penyiaran berbagai jenis media massa tentang tahapan pemilu
4. Memberikan dukungan aktif kepada peserta calon tertentu
5. Menyampaikan hasil pemantauan atas Pemilu dan menyampaikan pengaduan tentang dugaan pelanggaran pemilu
6. Melakukan survey dan menyebarluaskan hasil survey tentang pendapat atau persepsi pemilih tentang peserta calon

7. Melaksanakan dan menyebarluaskan hasil perhitungan cepat pemilu.

Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi politik, yaitu:

- a) Status sosial dan ekonomi
- b) Situasi
- c) Afiliasi politik orang tua
- d) Pengalaman berorganisasi
- e) Kepentingan publik
- f) Kepercayaan terhadap pemerintah

b. Partai Politik

Sekelompok orang yang terorganisir sedikit banyak memiliki kepentingan yang sama, serta memiliki tujuan untuk mendapatkan kekuasaan politik dan mempengaruhi kebijakan guna melaksanakan program yang sudah ditetapkan.

Beberapa indikator yang ada di partai politik yaitu sebagai berikut:

- 1) Ideologi
- 2) Cara kerja
- 3) Kepemimpinan
- 4) Manajemen Konflik
- 5) Basis dukungan
- 6) Pendulangan Dukungan
- 7) Pemosisian Calon Pemilih
- 8) Fungsi partai

c. Masyarakat

Sekumpulan orang-orang yang hidup dalam satu wilayah dengan memiliki hukum adat, norma-norma dan juga peraturan yang harus ditaati. Unsur-unsur masyarakat menurut Soekanto (2009), yaitu:

- a) Manusia yang hidup bersama-sama di Kota Tanjungpinang
- b) Bercampur dalam waktu yang cukup lama di Kota Tanjungpinang
- c) Mereka sadar bahwa mereka merupakan satu sama lain terikat dan terkait
- d) Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu sistem hidup bersama di Kota Tanjungpinang.

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2014:4) definisi penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk mengetahui dan mempelajari masalah-masalah yang ada serta didalamnya ada suatu upaya mendeskripsikan dan menganalisis kondisi masalah yang sedang terjadi. Penelitian deskriptif ini dimaksudkan untuk mengetahui partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang 2018 dan faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang 2018.

2. Data dan Sumber Data

a. Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka (Muhadjir, 1996).

b. Sumber Data

Sumber data adalah dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini, sumber data diperoleh dari:

- 1) Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari pihak pertama yang sifatnya cenderung lebih subjektif karena bersifat pendapat pribadi yang dikumpulkan melalui kuisioner wawancara oleh peneliti. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah masyarakat di Tanjungpinang. Data primer dalam penelitian adalah data mengenai partisipasi politik masyarakat.
- 2) Data Sekunder, yaitu data yang dikumpulkan oleh peneliti yang sifatnya cenderung lebih obyektif karena sudah diolah pihak ketiga, yang dikumpulkan oleh peneliti dari jurnal, monografi setempat, skripsi, tesis, disertasi, dll.

3. Unit Analisis

Unit analisis merupakan sesuatu yang berkaitan dengan fokus yang diteliti, yang dapat berupa benda, individu, wilayah dan waktu tertentu sesuai dengan fokus penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Tanjungpinang dengan informan adalah masyarakat Kota Tanjungpinang.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri atas:

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan beberapa pertanyaan secara terstruktur maupun tidak terstruktur. Informan yang di wawancarai adalah sebagai berikut:

1. Bpk Aswin Nasution : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang
2. Bpk Arlius S.Sos : Sekretaris Badan Kesbangpol Penmas
3. Ibu Nining : PNS
4. Bpk Alkhudri Anshari : Guru MAN Tanjungpinang
5. Bpk Dicky Wahyudi : Pedagang
6. Ibu Maryam : Pedagang
7. Ibu Egia Annisa : Masyarakat

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan juga pencatatan sistematis pada gejala-gejala yang ingin diteliti dengan menggunakan sebuah metode non partisipan, yaitu sebuah penelitian yang dimana penulis tidak ikut terlibat secara aktif dalam kegiatan yang dilakukan selama penelitian (Zuliyanti, 2017). Dalam observasi ini, penulis hanya mengamati kegiatan yang dilakukan masyarakat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan cara melengkapi data dari bidang keilmuan yang meliputi buku, majalah, surat kabar, rapat, artikel, jurnal dan data-data cetak yang memiliki korelasi dengan tema kajian yang akan dibahas (Arikunto, 2010). Mengacu pada pengertian tersebut, maka dalam penelitian penulis akan mencari data yang ada kaitannya dengan partisipasi politik masyarakat dalam pemilu.

4. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data yang telah diperoleh peneliti dari lapangan dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu penelitian non-hipotesis. Teknik ini dilaksanakan dengan cara mengklarifikasikan data lalu menganalisa sesuai dengan gejala obyek yang diteliti tanpa menggunakan perhitungan angka. Dalam teknik ini peneliti mencoba melakukan dengan membuat pengklarifikasian data yang diperoleh dari teknik pengumpulan

data yang digunakan seperti terdiri dari catatan lapangan, catatan peneliti, dokumentasi berupa laporan, studi pustaka, artikel, wawancara dan sebagainya. Adapun proses yang dilakukan dalam analisa data ini adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Tahap ini meliputi proses manipulasi, integritas, transformasi data dan menyoroti data ketika data itu disajikan. Tahap ini dilakukan dengan cara antara lain peningkatan, pengkodean dan pengkatagorisasikan data. Reduksi data membantu mengidentifikasi aspek-aspek penting dari pertanyaan sampel, metode-metode sehingga akhirnya pada suatu kesimpulan.

2. Pengorganisasian Data

Merupakan proses penyusunan semua informasi seputar tema-tema tertentu, pengkategorian informasi dalam cakupan yang lebih spesifik dan menyajikan hasilnya dalam beberapa bentuk.

3. Interpretasi Data

Proses ini mencakup pembuatan keputusan-keputusan dan membuat kesimpulan yang berkaitan dengan pertanyaan dalam penelitian. Pada tahap ini dilakukan pengidentifikasian pola-pola dan juga menemukan kecenderungan-kecenderungan. Memberikan penjelasan terhadap aspek-aspek tertentu yang memungkinkan pengembangan beberapa sudut pandang yang lebih tegas untuk menuntun penelitian selanjutnya.